

## BAB V

### RANCANGAN PUBLIKASI

#### 5.1 Abstraksi

Senjangan anggaran dalam proses penganggaran di sektor pemerintahan seharusnya dapat ditekan semaksimalnya agar anggaran lebih, efektif, efisien, dan ekonomis dan mengingat anggaran di sektor pemerintahan ditujukan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat. Senjangan anggaran berarti anggaran disusun dengan sengaja mengecilkan kemampuan produktifnya. Semakin besar potensi terjadi senjangan anggaran maka berdampak pada potensi pencapaian tujuan anggaran pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penganggaran diharapkan mampu mengurangi terjadinya senjangan anggaran.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan variabel yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Partisipasi anggaran dan asimetri informasi merupakan variabel yang sering dijadikan variabel bebas dalam hubungan dengan senjangan anggaran. Senjangan anggaran semaksimalnya dapat ditekan. Pada penelitian ini memasukkan variabel moderasi penggunaan teknologi informasi yang diduga mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap senjangan anggaran. Pemerintah mulai beralih menggunakan sistem informasi dalam penganggaran terutama untuk penyusunan anggaran dengan sistem ebudgeting sehingga perlu diuji pengaruhnya terhadap senjangan anggaran.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan sebanyak 56 responden dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan metode purposive sampling dimana nilai SAKIP sebagai salah satu kriteria. Pengujian yang digunakan adalah analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel X dengan Y, dan metode *Moderated Analysis Regression* (MRA) untuk menguji variabel moderasi..

Pengujian regresi berganda variabel X dan Y disimpulkan adanya pengaruh positif signifikan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Sedangkan asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Untuk uji MRA didapatkan hasil penggunaan teknologi memiliki pengaruh mengurangi hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran secara tidak signifikan dan Penggunaan teknologi dan informasi tidak dapat memoderasi pengaruh asimetri informasi dengan senjangan anggaran.

Penelitian ini diharapkan memacu penelitian lain meneliti variabel yang dapat mengurangi potensi terjadinya senjangan anggaran sehingga dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah dalam penyusunan anggaran.

**Kata Kunci :** *partisipasi anggaran, asimetri informasi, senjangan anggaran, teknologi informasi, pemerintahan, dan moderasi*

## 5.2 Tinjauan Teori

### Teori Agensi

Teori *agency* (keagenan) menurut Anthony dan Govindrajan (2005) adalah hubungan antara *principal* dan *agent* dimana satu atau lebih *principal* menyerahkan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk kepentingan mereka. Menurut Harahap (2012, hlm. 532) teori ini menyebutkan bahwa organisasi adalah tempat bagi hubungan kontrak yang terjadi antara beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Hubungan keagenan di pemerintah daerah memang memang unik. Selain tidak terdapat kontrak yang eksplisif dan lengkap antara prinsipal dan agen, juga tidak terdapat *reward and punishment* yang memadai. Itulah sebabnya mengapa kemudian bentuk hubungan kontrak di pemerintahan disebut *incomplete contrat*. (Abdullah, 2012a)

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2006) menjelaskan bagaimana hubungan keagenan di pemerintahan daerah dalam konteks penganggaran dan akuntansi dapat mencakup hubungan sebagai berikut:

- (1) Hubungan DPRD dengan Kepala Daerah;
- (2) Hubungan Kepala Daerah dengan pemilih (masyarakat);
- (3) Hubungan DPRD dengan pemilih (masyarakat); dan
- (4) Hubungan Kepala Daerah dengan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Hubungan keagenan antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD merupakan hubungan yang memiliki kontrak kerja lebih jelas dibanding yang cakupan hubungan lainnya mengingat bahwa Kepala OPD sebagai penerima mandat dari Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi OPD . Dalam penelitian ini menggunakan hubungan keagenan antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD.

Penerapan teori keagenan dapat menimbulkan dampak positif berupa efisiensi, tetapi penerapannya sering menimbulkan perilaku disfungsional berupa senjangan anggaran. Pencapaian target anggaran tentunya merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai, namun

dalam praktiknya seringkali terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menentukan rancangan biaya maupun target pendapatan yang ingin dicapai. Senjangan anggaran akan berdampak pada kesalahan alokasi sumber daya dan bias dalam evaluasi kinerja agen pada unit pertanggungjawabannya. Busuic (2011) menyebutkan bahwa teori informasi asimetri mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena agen memiliki informasi pribadi yang lebih banyak tentang bidangnya dibandingkan *principal*.

William H. Niskanen (1971, dalam Blais dan Dion, 1990) menyatakan bahwa *agency* (satuan kerja di pemerintahan) memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan alokasi anggaran pengeluarannya. Alokasi anggaran yang besar akan memudahkan *agency* (OPD dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena keleluasan untuk membuat “kebijakan” dalam membiayai program dan kegiatannya. Apabila semua OPD dalam sebuah pemerintahan daerah melakukan maksimalisasi alokasi anggaran ini akan berimplikasi pada tidak cukupnya alokasi anggaran pemerintahan daerah mengingat adanya keterbatasan sumber daya (*budget constraints*) yang dimiliki pemerintahan daerah.

Ketika menganggarkan pendapatannya dalam RKA OPD, OPD memiliki kecenderungan untuk menentukan target dibawah potensi pendapatan sebenarnya. Anggaran pendapatan yang dibawah potensi sebenarnya akan memudahkan OPD untuk mencapainya dengan usaha yang tidak maksimal. Adanya penyusunan anggaran pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi sesungguhnya inilah yang disebut dengan senjangan atau kesenjangan anggaran (*budgeting slack*). Senjangan ini dapat dijadikan sebagai *proxy* atau pengukuran untuk masalah keagenan dalam penganggaran pendapatan karena mencerminkan asimetri informasi antara kepala OPD selaku pengguna anggaran dengan kepala daerah selaku pemilik anggaran. Seandainya informasi yang dimiliki kepala OPD dan kepala daerah simetris maka anggaran atau target pendapatan yang harus dicapai oleh kepala OPD sama dengan potensi yang sesungguhnya.

### **Aspek Keperilakuan dalam Penganggaran**

Pandangan berperilaku dari perusahaan menurut Suartana (2010) memandang pencapaian tujuan sebagai sesuatu yang dinamis dan merefleksikan kebutuhan individual dan tujuan-tujuan dari sub-sub unit yang ada. Kesepatan mengenai tujuan dan pencapaian sasaran dalam kongruensi tujuan organisasional yang mendukung kelangsungan perusahaan pasti menjadi tujuan bersama. Ada banyak variabel dan faktor dalam perusahaan yang bisa

jadi menghalangi tujuan. Faktor-faktor yang dimaksud bisa bersifat personalitas maupun lingkungan organisasi.

Anggaran merupakan bagian penting dalam perusahaan atau organisasi sektor publik. Anggaran adalah alat pengendalian bagi perusahaan. Penting dan urgennya fungsi anggaran sebagai perencana dan pengendali perusahaan menjadikan penganggaran sebagai area penting bagi keberhasilan perusahaan. Anggaran diharapkan menjadi rerangka kerja untuk menentukan prestasi dan kinerja karyawan.

Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran (Suartana, 2010). Anggaran dan proses penganggaran memiliki dampak langsung dan menentukan yang memengaruhi perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka kapan, dimana dan berapa hal tersebut sudah dilakukan dan dioperasikan. Anggaran menetapkan limit terhadap apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Anggaran membatasi tindakan diskresi manajemen sekaligus mengukur kinerja mereka. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran, meskipun pada organisasi sektor publik, misalnya pemerintah, efisiensi mempunyai makna berbeda dibandingkan dengan sektor korporat. Pada organisasi pemerintahan penyerapan anggaran yang tinggi justru baik, asalkan sasarannya benar (efektivitas). Penyerapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Partisipasi anggaran merupakan masalah keperilakuan dalam penyusunan anggaran. Keduanya akan memberikan kontribusi positif apabila dikendalikan dan dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi dan informasi yang baik akan dapat membantu menjembatani permasalahan partisipasi anggaran dan asimetri informasi dalam perencanaan anggaran. Menurut Surtana (2010), secara teoritis dapat dikatakan bahwa informasi asimetris dapat dikurangi melalui monitoring dan desain sistem informasi yang lebih baik.

### **Teori Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*)**

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (Pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*) sehingga setiap detail anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan *output* dan *outcome* yang

jelas dan sesuai dengan prioritas daerah. Sehingga prinsip anggaran berbasis kinerja melihat anggaran bukan hanya pada hasil (*output*) akan tetapi juga melihat dampak yang dihasilkan (*outcome*).

Kata kinerja merupakan kunci pokok untuk memahami anggaran berbasis kinerja. Untuk mendukung sistem anggaran berbasis kinerja diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan yang berupa indikator kinerja (*performance indicators*). Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (*target*) yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga dapat dinilai tingkat efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan.

Secara umum prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. (taufiqurrahman, 2014)

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) sejak tahun 2014 dengan menggunakan instrumen penilaian berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

### **Teori Penyusunan Anggaran**

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019)

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. KUA PPAS merupakan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap kebijakan dan program perencanaan kegiatan dan anggaran yang harus dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun kepala daerah berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Selain memuat rencana tersebut, RKA SKPD juga memuat informasi mengenai urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Kinerja yang akan dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja.

RKA SKPD yang telah disusun kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) melalui PPKD untuk diverifikasi. TAPD merupakan pembantu Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD yang beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, dan pejabat lain

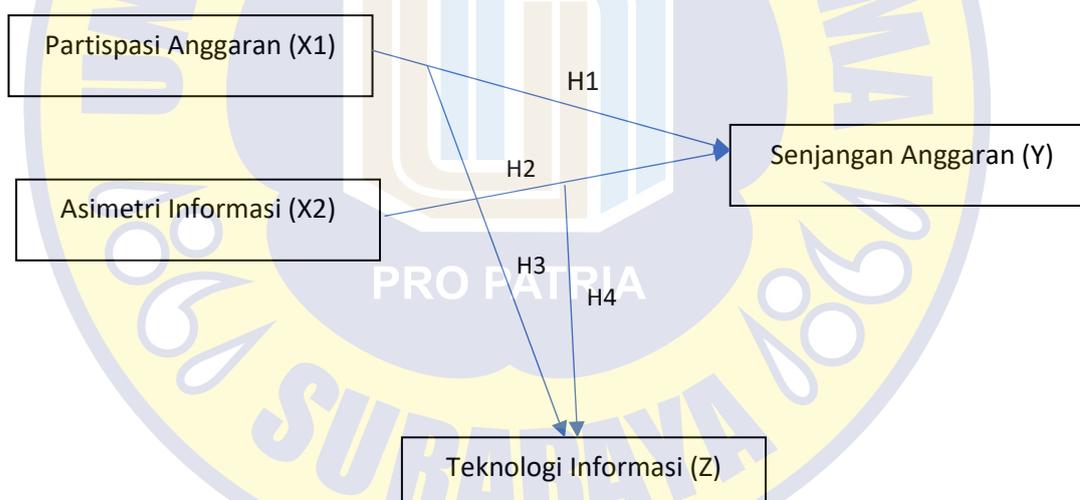
sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Dalam hal verifikasi TAPD atas RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.

Hubungan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam proses penyusunan APBD lebih nyata terlihat meskipun berdasarkan pengawasan melalui Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Rerangka Berpikir

Secara sistematis, rerangka berpikir yang digunakan penelitian ini adalah disajikan pada gambar dibawah ini:



### Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat ditarik menjadi hipotesis dari penelitian ini dengan membandingkan variabel penelitian yaitu variabel independent dari penelitian ini adalah Partisipasi anggaran (X1), Asimetri informasi (X2), sedangkan variabel dependennya adalah Senjangan anggaran (Y) dengan variabel moderasi adalah Penggunaan teknologi informasi (Z). Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

***H1 : Partisipasi anggaran (X1) berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran (Y) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.***

Dengan memperhatikan bahwa anggaran digunakan menjadi salah satu ukuran kinerja organisasi maka semakin tinggi partisipasi anggaran seorang bawahan (pembuat anggaran) dalam penyusunan anggaran maka kemungkinan akan menambah senjangan anggaran. Semakin tinggi atau kebebasan pembuat anggaran mengambil peran dalam penyusunan anggaran artinya bawahan akan mendorong semakin tinggi pula senjangan anggaran. Kecenderungan perilaku dari pembuat anggaran adalah membuat anggaran yang mudah untuk dicapainya. Karena pencapaian target anggaran merupakan salah satu tolok ukur dari capaian kinerja dan prestasi.

Hipotesis pertama ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Cahyadi Luhur & Supadmi, 2019; Maharani & Ardiana, 2015; Nanda Narotama & Sujana, 2020) yang menyatakan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.

***H2 : Asimetri Informasi (X2) berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran (Y) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.***

Asimetri informasi merupakan perbedaan informasi bawahan dengan level yang di atasnya, sehingga semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi di sebuah instansi maka senjangan anggaran saat penyusunan anggaran juga semakin tinggi, sehingga asimetri informasi dapat diduga akan berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Semakin pembuat anggaran mempunyai informasi yang lebih banyak daripada atasan maka kontrol/pengendalian dari atasan (kepala daerah) atau TAPD selaku verifikator terhadap RKA SKPD akan menjadi lemah.

Hipotesis ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Cahyadi Luhur & Supadmi, 2019; Maharani & Ardiana, 2015) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Penelitian terdahulu yang menolak hipotesis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh

***H3 : Penggunaan Teknologi informasi (Z) berpengaruh negatif pada hubungan antara Partipasi anggaran (X1) terhadap senjangan anggaran (Y) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.***

Dengan penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan maka partisipasi anggaran dari bawahan dapat dikendalikan sehingga senjangan anggaran yang terjadi dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan karena dengan pemanfaatan teknologi informasi maka atasan dapat menerapkan kebijakan penyusunan anggaran melalui *query* pada aplikasi penganggaran, serta atasan dengan cepat mengetahui informasi yang disajikan dalam penyusunan anggaran sehingga atasan dapat segera mengambil langkah-langkah

pengecegan ketika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian. Sehingga dapat diduga bahwa penggunaan teknologi informasi memodernisasi terhadap Partisipasi anggaran, terhadap senjangan anggaran dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Surabaya.

Hipotesis ini sejalan dengan penelitian – penelitian terdahulu (Zahra et al., 2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara teknologi informasi dengan senjangan anggaran. Dengan teknologi informasi akan mengurangi senjangan anggaran yang terbentuk karena partisipasi anggaran dan asimetri informasi yang tidak terkontrol. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sulistiyani (2019).

***H4 : Penggunaan Teknologi informasi (Z) berpengaruh negatif pada hubungan antara Asimetri Informasi (X2) terhadap senjangan anggaran (Y) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.***

Dengan penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan maka kesenjangan informasi atasan dengan bawahan akan dapat dikurangi karena informasi yang disampaikan bawahan akan dapat terus dipantau oleh atasan begitu pula informasi yang berupa kebijakan penganggaran yang ingin disampaikan atasan kepada bawahan juga lebih cepat tersampaikan.

Atasan/pemegang kuasa anggaran menerima informasi yang belum diketahui sebelumnya dan berusaha meningkatkan akurasi pemahaman terhadap bawahan/pelaksana anggaran sehingga semakin mengurangi informasi asimetris dalam hubungan atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran, dalam hal ini kepala bagian dengan kepala sub bagian serta bagian-bagian dibawahnya. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa informasi aseimetris dapat dikurangi melalui monitoring dan desain sistem informasi yang lebih baik. (Suartana, 2010)

Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji pengaruh asimetri informasi dengan senjangan anggaran menghasilkan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran (IDewa Gde Nanda, 2020; Rachmad Zainal Irfan, 2017; Elma octavita Pradita &Haryanto, 2017; Akhmad Azmi Basyir, 2016). Oleh karena itu perlu diuji dengan variabel yang mampu mempengaruhi hubungan kedua variabel, yaitu dengan ditambahkan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai variabel moderasi yang diduga dapat mengurangi/menekan pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

### **5.3 Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, serta akurat.

Gejala yang menjadi objek penelitian disini adalah peristiwa penyusunan anggaran pemerintah daerah yang diduga terjadi karena pengaruh partisipasi anggaran dan asimetri informasi serta penggunaan teknologi informasi yang diduga mampu mempengaruhi hubungan antar variabel. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh variabel-variabel penelitian tersebut dan mengetahui seberapa besar pengaruh yang diperoleh oleh setiap variabel.

### **Populasi dan Sampel**

Dahlan (2014) menjelaskan bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memperoleh karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah di lingkungan Surabaya. Pemilihan populasi mempertimbangkan bahwa Surabaya dapat dikatakan sebagai pemerintah daerah yang menerapkan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan termasuk dalam hal ini yang pertama kali mendesain *ebudgeting* dalam penyusunan anggaran.

Metode purposive sampling merupakan metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini. Metode ini digunakan bertujuan untuk menghindari adanya bias dari penelitian dengan memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang nilai SAKIP -nya urutan 10 (sepuluh) tertinggi pada tahun 2019 non kecamatan; dan
- 2) Tiga Perangkat daerah yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Surabaya dan tidak termasuk kriteria pada angka 1; dan
- 3) Responden merupakan pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Pemilihan kriteria sampel bermaksud agar mendapatkan responden yang benar-benar memahami proses penyusunan anggaran di masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Kota Surabaya.

### **Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data merupakan data primer yang berupa kuesioner yang harus diisi oleh responden. Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pernyataan kepada responden

mengenai partisipasi anggaran, asimetri informasi, penggunaan teknologi informasi, dan senjangan anggaran.

Hasil jawaban tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert, yaitu pilihan jawaban responden diberi nilai dengan skala 5 poin. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda yang dihitung dengan program SPSS.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum demografi responden, selanjutnya dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas butir pertanyaan dikatakan sah atau valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel (Nugroho, 2011). Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach's Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$  (Ghozali 2002). Setelah uji kualitas data, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji multikolinieritas dilihat nilai tolerance, jika lebih rendah dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan hasil perhitungan nilai VIF, jika memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka tidak mempunyai persoalan multikolinieritas (Ghozali, 2009). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga dengan melihat grafik scatterplot, dengan kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yaitu tidak terdapat pola yang jelas dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, misalnya tidak bergelombang, tidak melebar, dan tidak menyempit.

Setelah data dipastikan telah valid dan reliabel, tahap selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Analisis regresi berganda dilakukan dengan Uji-t, Uji-F, dan Koefisien Determinasi. Uji-t dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.

Tahap terakhir yaitu model analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini adalah model analisis regresi moderasi interaksi (*Moderated Regression Analysis*). Analisis regresi ini merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda yang mengandung unsur interaksi

(perkalian dua atau lebih variabel independen). Analisis regresi ini digunakan untuk penelitian yang menggunakan variabel moderasi dalam penelitiannya.

## **5.4 Pembahasan dan Temuan**

### **Gambaran Umum Variabel**

#### **Senjangan Anggaran**

Senjangan anggaran menggambarkan salah satu jumlah sumber daya tambahan yang sengaja dibangun manajer dalam anggarannya atau berarti dengan sengaja mengecilkan kemampuan produktifnya (Onsi, 1973). Senjangan anggaran merupakan langkah pembuat anggaran untuk mencapai target yang lebih mudah dicapai padahal kapasitas sesungguhnya masih jauh lebih tinggi. Banyak pembuat anggaran cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai. Manajer berharap dengan melakukan senjangan anggaran bertujuan agar sasaran dapat mudah dicapai dan menurunkan risiko kegagalan mencapai target anggaran.

Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Dalam istilah statistik, hal ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja dengan cukup baik mempunyai kesempatan paling tidak sebesar 50% untuk mencapai jumlah anggaran (Anthony Robert & Vijay, 2004). Sehingga dalam penyusunan anggaran dapat dikatakan akan terjadi akan tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana meminimalisirkannya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti variabel-variabel yang dapat mengakibatkan senjangan anggaran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel partisipasi anggaran dan asimetri informasi yang mempengaruhi terhadap senjangan anggaran, dengan dimoderasi oleh penggunaan teknologi informasi.

Senjangan anggaran berbeda dengan selisih anggaran (*budget varians*). Kesenjangan anggaran merupakan selisih antara target yang ditentukan dengan potensi atau kemampuan yang sesungguhnya, sedangkan *budget varians* adalah selisih antara target anggaran dengan realisasi yang sesungguhnya (Abdullah, 2012). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan variabel senjangan anggaran maka penelitian ini membatasi pada proses penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah.

#### **Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sebagai suatu kesempatan yang diberikan kepada para bawahan untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran bersama atasan. Partisipasi anggaran di satu sisi akan meningkatkan motivasi pegawai dalam pelaksanaan anggaran karena keterlibatan dalam penyusunan anggaran. Sebaliknya ketika pencapaian target anggaran dijadikan penilaian kinerja, karyawan mulai merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisahan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau kepuasan karena memenuhi anggaran.

Menurut Gudono (1993) dalam Suartana (2010) penyusunan anggaran dapat menimbulkan dampak psikologis langsung pada karyawan. Tidak sedikit manajer departemen tertentu mengalami keresahan jika prestasinya (dilihat dari realisasi anggaran) tidaklah bagus setelah dibandingkan dengan anggaran yang harus dicapai.

Keikutsertaan bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan dapat meningkatkan motivasi bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Meskipun partisipasi anggaran memiliki banyak kegunaan, tidak berarti partisipasi tidak memiliki keterbatasan dan masalah. Partisipasi dapat merusak motivasi serta menurunkan kemampuan dalam mencapai target perusahaan apabila partisipasi tersebut tidak diterapkan dan dikendalikan dengan benar. Partisipasi yang tidak terkendali akan membuat Pembuat anggaran akan berusaha menyusun anggaran yang “aman” untuk dicapai sebagai ukuran keberhasilan kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Falikhatun (2007) dan Lukka (1988) bahwa partisipasi dapat mempengaruhi senjangan anggaran.

### **Asimetri Informasi**

Asimetri informasi juga dijelaskan dalam teori agensi dimana teori ini mendasarkan hubungan kontrak antara prinsipal membawahi agen. Menurut teori ini agent lebih banyak mempunyai informasi dan lebih memahami perusahaan sehingga menimbulkan asimetri informasi. “Permasalahan yang muncul dalam hubungan *agency* adalah bahwa *principal* bersikap netral terhadap risiko sementara agent bersikap menolak usaha dan risiko” (Ikhsan dan Ishak, 2005: 56). Oleh karena itu, bawahan cenderung untuk melakukan *budgetary slack* karena adanya keinginan untuk menghindari risiko dengan memberikan informasi yang bias, sehingga dapat dikatakan bahwa asimetri informasi merupakan pemicu *budgetary slack* (Armaeni, 2012). Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak memiliki cukup pengetahuan informasi tentang perusahaan, sementara yang lain tidak (Hanifah, 2013). Menurut Dunk (1993) dalam Dewi (2013), jika kinerja agen dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran, maka agen termotivasi untuk tidak memberikan seluruh informasi

yang dimilikinya pada saat perencanaan anggaran, hal ini pula dikatakan sebagai pemicu senjangan anggaran.

### **Teknologi Informasi**

Menurut Maryono Y. Patami Istiana (2008) menyatakan bahwa teknologi adalah suatu alat yang dapat memberikan keuntungan untuk penggunaannya, data yang digunakan untuk membantu dan memudahkan kinerja karyawan. Perkembangan teknologi yang terutama di era informasi sekarang ini berdampak sangat baik terhadap kinerja karyawan untuk membantu dalam tujuan organisasi.

Dalam sistem pemerintahan sekarang ini terus didorong untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam kinerjanya. Termasuk pula dalam hal proses penyusunan anggaran. Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan pionir dalam penciptaan *e-Government (e-Gov)*. Proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran, termasuk pula monitoring dan evaluasi anggaran sudah dilakukan secara elektronik dengan sistem terpadu. *Ebudgeting* termasuk dalam salah satu sistem *e-government* yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Yang kemudian sistem ini diadopsi oleh pemerintah pusat melalui KPK dihimbau ke pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan sistem *e-government*.

Penggunaan teknologi informasi dengan desain yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan tentunya akan meminimalkan terjadinya kesalahan dan mempermudah pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Dengan teknologi informasi manajemen atas dapat melakukan pengendalian kepada bawahan dengan tepat sehingga partisipasi anggaran dapat dikendalikan dan asimetri informasi juga dapat dihindari karena teknologi informasi sudah dirancang sesuai kebutuhan pengguna, terutama kebutuhan dari manajemen. Sehingga anggaran yang disusun dengan menggunakan teknologi informasi merupakan sebuah anggaran yang sesuai kebutuhan dan harapan.

### **Sebaran Analisis Statistik Deskriptif**

Respon responden terhadap sebaran deskriptif jawaban dari pertanyaan kuesioner yang diajukan peneliti disajikan dalam tabel dibawah ini.

Descriptive Statistics								
	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Variance Statistic
					Statistic	Std. Error		
Senjangan Anggaran	56	15	13	28	20.82	.352	2.636	6.949
Partisipasi Anggaran	56	13	17	30	25.41	.417	3.120	9.737
Asimetri Informasi	56	24	6	30	18.18	.814	6.091	37.095
Penggunaan Teknologi Informasi	56	12	18	30	26.25	.388	2.900	8.409
Valid N (listwise)	56							

Sumber : output SPSS

Dari hasil analisis statistik deskriptif diatas didapatkan hasil variabel asimetri informasi mempunyai nilai Mean terendah diantara variabel lain dengan nilai 18,18, sementara mean tertinggi diperoleh pada variabel penggunaan teknologi informasi dengan nilai 26,25. Nilai mean menunjukkan dimana letak pusat data. Letak pusat data mean pada variabel asimetri informasi berada di tengah nilai minimum dan maksimum. Sementara variabel lain mempunyai kecenderungan mean mendekati pada nilai maksimum.

Standar deviasi merupakan jarak rata-rata skor dari mean. Standar deviasi menggambarkan distribusi sebaran data. Semakin tinggi standar deviasi semakin tinggi sebaran skor data, semakin tinggi perbedaan satu dengan yang lain, yang berarti datanya juga semakin heterogen. Standar deviasi terbesar diperoleh pada variabel asimetri informasi dengan nilai 6,091. Sehingga variabel asimetri informasi ini mempunyai sebaran data yang cukup heterogen. Hasil ini juga dikuatkan dengan nilai range yang lebar pada variabel asimetri informasi dengan nilai 24.

### Uji Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis instrumen penelitian dipastikan dulu datanya valid dan realibel melalui uji instrumen dan memastikan data penelitian bebas dari permasalahan asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi: uji normalitas data; uji multikoliberitas; dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesisi, uji instrumen, dan uji asumsi klasik menggunakan bantuan SPSS versi 28.

### Uji Instrumen Penelitian

Variable	Item	Validitas (r tabel = 0,266)	Realibilitas
----------	------	--------------------------------	--------------

		Pearson Correlation (r hitung)	sig (2 tailed)	Kesimpulan	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Partisipasi Anggaran	X1_1	0,573	<0,01	Valid	0,798	Realibilitas tinggi
	X1_2	0,726	<0,01	Valid		
	X1_3	0,812	<0,01	Valid		
	X1_4	0,739	<0,01	Valid		
	X1_5	0,683	<0,01	Valid		
	X1_6	0,769	<0,01	Valid		
Asimetri Informasi	X2_1	0,933	<0,01	Valid	0,937	Realibilitas Sangat Tinggi
	X2_2	0,911	<0,01	Valid		
	X2_3	0,950	<0,01	Valid		
	X2_4	0,621	<0,01	Valid		
	X2_5	0,881	<0,01	Valid		
	X2_6	0,928	<0,01	Valid		
Senjangan Anggaran	Y_1	0,503	<0,01	Valid	0,720	Realibilitas tinggi
	Y_2	0,580	<0,01	Valid		
	Y_3	0,491	<0,01	Valid		
Penggunaan Teknologi Informasi	Z_1	0,882	<0,01	Valid	0,887	Realibilitas sangat tinggi
	Z_2	0,857	<0,01	Valid		
	Z_3	0,728	<0,01	Valid		
	Z_4	0,814	<0,01	Valid		
	Z_5	0,776	<0,01	Valid		
	Z_6	0,748	<0,01	Valid		

Berdasarkan uji instrumen penelitian diatas telah didapatkan bahwa semua item dalam instrumen penelitian yang akan dilakukan pengujian telah dinyatakan valid dan realibel. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih dari nilai r tabel dan signifikasi kurang dari (<) 0,05. nilai r tabel dengan 56 sampel (df = n-2), dimana r tabel adalah 0,266.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah *error* yang diestimasikan dari pengukuran terdistribusi secara normal (Hayes, 2013). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak digunakan untuk pengujian secara statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov test* dan *normal probability plot*. Pada metode Kolmogorov Smirnov data penelitian dikatakan normal apabila taraf signifikasi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). Selain menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov test* juga dilakukan menggunakan *normal probability plot* untuk menguji normalitas data. Metode *normal probability plot* melihat bagaimana pola persebaran data terhadap garis

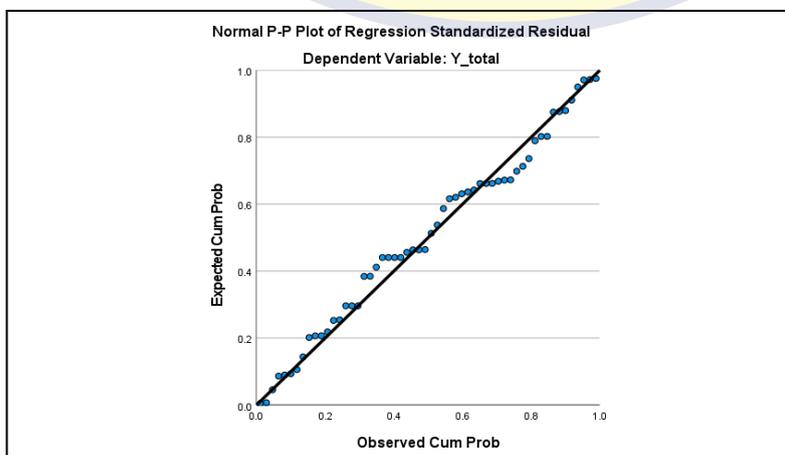
diagonal. Apabila persebaran data memiliki kecenderungan untuk selalu mengikuti garis diagonalnya maka data dikatakan normal.

Pengujian *Kolmogorov-Smirnov test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		56	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.40615526	
Most Extreme Differences	Absolute	.082	
	Positive	.074	
	Negative	-.082	
Test Statistic		.082	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.445	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.432
		Upper Bound	.457
<p>a. Test distribution is Normal.                      b. Calculated from data.                      c. Lilliefors Significance Correction.                      d. This is a lower bound of the true significance.                      e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.</p>			

Sumber: output SPSS

Dari hasil pengujian menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov test* diatas menunjukkan hasil bahwa signifikansi yang ditunjukkan oleh *Asymp. Sig (2-tailed)* menunjukkan nilai 0,200. Sehingga hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan data terdistribusi dengan normal karena signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ).



## Normal Probability Plot

Dari gambar normal probability plot diatas tampak bahwa penyebaran data mengikuti garis diagonal. Sehingga dari pengujian dengan menggunakan metode probability plot juga menghasilkan bahwa data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya didalam sebuah model regresi. Cara mendeteksi multikolinearitas dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 dapat diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

#### Pengujian Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	3.318	1.660		1.999	.051			
X1_total	.347	.062	.601	5.591	<.001	.997	1.003	
X2_total	.041	.032	.140	1.300	.199	.997	1.003	

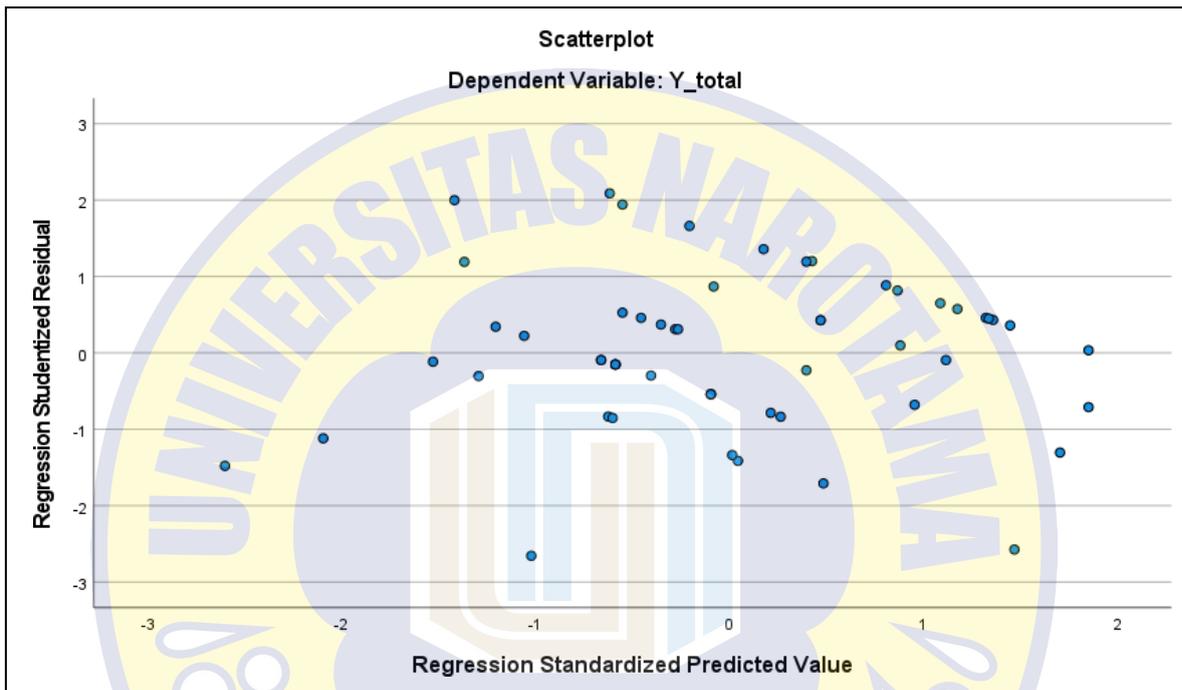
a. Dependent Variable: Y\_total

Sumber: output SPSS

Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS menunjukkan hasil bahwa pengujian terhadap variabel X1 (Partisipasi Anggaran) terdapat hasil nilai *tolerance* sebesar 0,997 dan nilai VIF sebesar 1,003 sehingga pada pengujian variabel partisipasi anggaran tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Untuk pengujian variabel X2 (Asimetri Informasi), hasil nilai *tolerance* sebesar 0,997 dan nilai VIF sebesar 1,003 sehingga pada pengujian variabel asimetri informasi pun menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui jika terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Apabila varian dari residual sebuah pengamatan terlihat tetap maka disebut homokedastisitas. Apabila varian dari residual berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah ketika homokedastisitas artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas penelitian ini menggunakan metode *scatter plot* dan uji glejser.



Uji Heterokedastisitas dengan *Scatter Plot*

Pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan SPSS dengan metode *scatter plot* pada gambar 4.3 diatas menunjukkan tidak ada pola yang jelas pada titik scatterplot dan titik-titik menyebar diatas atau dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga disimpulkan bahwa bebas dari permasalahan heterokedastisitas.

#### Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.686	1.020		1.652	.104
	Partisipasi anggaran	-.045	.038	-.157	-1.177	.244
	Asimetri informasi	.029	.020	.200	1.497	.140

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: output SPSS

Dari pengujian dengan menggunakan metode Uji Glejser pada tabel 4.21 diatas mendapatkan hasil nilai signifikasi untuk variabel Partisipasi Anggaran adalah sebesar 0,244 dan untuk variabel Asimetri Informasi sebesar 0,140. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji glejser juga tidak terdapat permasalahan heterokedastisitas karena nilai signifikasi lebih dari 0,05.

### Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan uji instrument dan uji asumsi klasik telah didapatkan data penelitian yang valid dan realibel serta bebas dari permasalahan asumsi klasik, seperti bebas dari permasalahan heterokedastisitas dan multikolinearitas, serta data terdistribusi secara normal. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan akan menggunakan analisis regresi linear berganda artinya ada lebih dari satu variabel independent (X) dan 1 variabel dependen (Y) dan jaganuji variabel *moderating* dengan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan Uji signifikasi parameter individual (uji-t), Uji Signifikasi Simultan (Uji-F), dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji-t)

Ghozali (2018:152) menyatakan bahwa uji-t berfungsi untuk menghitung dan mengetahui apakah variabel independent secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji-t dilakukan untuk mencari nilai t hitung, jika t hitung > t tabel atau nilai signifikasi < 0,05 maka dapat disimpulkan secara individual variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga kriteria pengambilan keputusan

Nilai t tabel didapat dari  $df = n - k - 1$

dimana:

n = jumlah observasi

k = variabel independent

Sehingga  $df = 53 (56 - 2 - 1)$ , dan nilai t tabel senilai 1,674

### Uji-t variabel

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			

1	(Constant)	3.318	1.660		1.999	.051
	Partisipasi anggaran	.347	.062	.601	5.591	<,001
	Asimetri informasi	.041	.032	.140	1.300	.199

a. Dependent Variable: Senjangan anggaran

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hubungan variabel partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran menunjukkan signifikansi sebesar  $< 0,001$  dan kurang dari  $0,05$  ( $< 0,05$ ), artinya senjangan anggaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Untuk hasil dari t hitung sebesar 5,591. Nilai ini lebih besar dari t tabel yang bernilai 1,674, sehingga t hitung  $>$  t tabel. Hasil ini artinya partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran.
- 2) Hasil pengujian hipotesis untuk hubungan variabel asimetri informasi dengan senjangan anggaran menunjukkan signifikansi 0,199. Hasil signifikansi ini melebihi dari nilai  $0,05$  sehingga signifikansi lebih dari  $0,05$  artinya variabel asimetri informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Untuk hasil dari t hitung senilai 1,300. Nilai ini lebih kecil dari t tabel yang bernilai 1,674, sehingga t hitung  $<$  t tabel. Hasil ini artinya asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel.

Tabel  
Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	69.375	2	34.688	16.905	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	108.750	53	2.052		
	Total	178.125	55			

a. Dependent Variable: Y\_total  
b. Predictors: (Constant), X2\_total, X1\_total

Sumber: output SPSS

Dari tabel F diatas maka didapatkan hasil bahwa df1 adalah 2 yang merupakan jumlah variabel independen yang dipakai, sedangkan df2 adalah 53 didapat dari rumus:

$$df = n - k - 1$$

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel independent

Setelah didapatkan nilai df maka dapat ditentukan nilai F tabelnya yaitu senilai 3,17. Hasil penghitungan F hitung sebagaimana tabel 4. diatas didapatkan senilai 16,905, sehingga F hitung > F tabel. Dan nilai signifikasi < 0,001 sehingga nilai signifikasi < 0,05, Ini berarti terjadi hubungan secara bersama-sama antar variabel

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar kekuatan model menjelaskan variasi variabel terikat. Besar nilainya 0 atau 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil diartikan kemampuan semua variabel bebas dalam menerangkan sangat terbatas. Apabila nilainya mendekati angka 1 artinya semua variabel bebas memberikan hampir seluruh data dan informasi yang diperlukan (Ghozali, 2016).

Koefisien Determinasi Variabel

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.624 <sup>a</sup>	.389	.366	1.432	2.394

a. Predictors: (Constant), X2\_total, X1\_total  
b. Dependent Variable: Y\_total

Sumber: output SPSS

Berdasarkan data pada diatas maka nilai R sebesar 0,624 yang berarti hubungan pengaruh secara bersama-sama variabel independen dan variabel dependen cukup kuat karena nilai R lebih dari 0,5. Nilai dari R Square (R<sup>2</sup>) adalah 0,389 atau 38,9%. Artinya bahwa variabel independen partisipasi anggaran (X1) dan Asimetri Informasi (X2) mempunyai pengaruh sebesar 0,389 atau 38,9% terhadap senjangan anggaran. Sedangkan sisanya sebesar 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

### Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk mengetahui apakah variabel Z (Penggunaan Teknologi Informasi) mampu moderasi hubungan antar variabel independen dan variabel dependen maka digunakan analisis dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Untuk menguji keberadaan variabel Moderasi (Z) dalam memoderasi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), langkah awal yang dilakukan adalah:

(1) Estimasi X dan Z terhadap Y  $\longrightarrow Y = \beta_0 + \beta_1X + \beta_2Z + \epsilon$

(2) Estimasi interaksi X\*Z, X terhadap Y  $\longrightarrow Y = \beta_0 + \beta_1X + \beta_2Z + \beta_3X*Z + \epsilon$

Menurut Baron dan Kenny (1986), Variabel Z dalam memoderasi X terhadap Y akan teridentifikasi dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama dan pengaruh interaksi X\*Z pada estimasi kedua sama-sama signifikan terhadap Z maka termasuk Quasi Moderator (Moderator Semu). Quasi moderator merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimanamoderasi semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel dependen.
- (2) Apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama tidak berpengaruh signifikan terhadap Y sedangkan Interaksi X1\*Z pada estimasi kedua berpengaruh signifikan terhadap Y termasuk pure moderator (Moderator Murni). Pure moderator merupakan variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen.
- (3) Apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama signifikan dan pengaruh Interaksi X1\*Z pada estimasi kedua tidak signifikan termasuk Prediktor Moderasi. Artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk.
- (4) Apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama dan pengaruh Interaksi X1\*Z pada estimasi kedua, tidak ada satupun yang signifikan termasuk Homologlizer Moderasi (Moderasi Potensial). Artinya, variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. **Hubungan**

**Variabel Partisipasi Anggaran (X1), Senjangan Anggaran (Y), dan Penggunaan Teknologi Informasi (Z)**

Estimasi antara X1 dan Z terhadap Y sebagaimana tabel berikut ini:

Hubungan X1 dan Z terhadap Y

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.051	1.990		.528	.600
	Partisipasi anggaran	.303	.063	.526	4.782	<.001
	Penggunaan Teknologi Informasi	.157	.068	.253	2.298	.026

a. Dependent Variable: Senjangan anggaran

Sumber: output SPSS

Dari tabel diatas bahwa signifikasi variabel penggunaan teknologi informasi (Z) terhadap variabel senjangan anggaran adalah senilai 0,026. Sehingga signifikan karena  $\text{sig} < 0,05$ .

Estimasi interaksi  $X1*Z$  dan X terhadap Y, sebagaimana tabel dibawah ini

Hubungan Interaksi  $X1*Z$  dan X terhadap Y

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-19.963	12.263		-1.628	.110
	Partisipasi anggaran	1.138	.485	1.973	2.347	.023
	Penggunaan Teknologi Informasi	.961	.468	1.549	2.053	.045
	Interaksi1	-.032	.018	-2.243	-1.736	.089

a. Dependent Variable: Senjangan anggaran

Sumber: output SPSS

Dari tabel diatas bahwa signifikasi interaksi  $X1*Z$  terhadap variabel Y senilai 0,089. Sehingga tidak signifikan karena  $\text{sig} > 0,05$ .

Sehingga Penggunaan teknologi informasi dikategorikan sebagai prediktor moderasi karena signifikasi pada estimasi pertama hubungan X dan Z terhadap Z bernilai signifikan dan hubungan interaksi  $X*Z$  dan X terhadap Z tidak signifikan.

### Hubungan Variabel Asimetri Informasi (X2), Senjangan Anggaran (Y), dan Penggunaan Teknologi Informasi (Z)

Estimasi antara X2 dan Z terhadap Y sebagaimana tabel berikut ini:

Hubungan X2 dan Z terhadap Y

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.645	2.056		2.745	.008
	Penggunaan Teknologi Informasi	.253	.078	.408	3.263	.002
	Asimetri informasi	.032	.037	.110	.879	.383

a. Dependent Variable: Senjangan anggaran

Sumber: output SPSS

Dari tabel diatas bahwa signifikasi variabel penggunaan teknologi informasi (Z) terhadap variabel senjangan anggaran adalah senilai 0,002. Sehingga signifikan karena  $\text{sig} < 0,05$ .

Estimasi interaksi X2\*Z dan X terhadap Y, sebagaimana tabel dibawah ini

Hubungan Interaksi X2\*Z dan X terhadap Y

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-7.074	9.204		-.769	.446
	Penggunaan Teknologi Informasi	.723	.340	1.165	2.124	.038
	Asimetri informasi	.705	.476	2.386	1.481	.145
	Interaksi2	-.025	.017	-2.511	-1.417	.162

a. Dependent Variable: Senjangan anggaran

Dari tabel 4. diatas bahwa signifasi interaksi X1\*Z terhadap variabel Y senilai 0,16 dan dinyatakan tidak signifikan karena sig > 0,05..

Sehingga Penggunaan teknologi informasi dikategorikan sebagai prediktor moderasi karena signifkasi pada estimasi pertama hubungan X dan Z terhadap Z bernilai signifikan dan hubungan interaksi X\*Z dan X terhadap Z tidak signifikan.

### Interpretasi Hasil dan Pembahasan

#### Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran

Berdasarkan hasil uji t penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 28 didapatkan hasil bahwa variabel partisipasi anggaran (X1) terhadap senjangan anggaran (Y) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan . dengan nilai t hitung 5,591 sementara nilai t tabel adalah senilai 1, 674. dan signifkasi 0,000. Ini artinya semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan meningkatkan secara signifikan senjangan anggaran, begitu sebaliknya semakin rendah partisipasi anggaran maka akan menurunkan secara signifikan senjangan anggaran. Sehingga hipotesis pertama penelitian **(H1) diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh pada senjangan anggaran. Penelitian terdahulu tersebut adalah I Dewa Gde Nanda (2020), Ida Bagus Surya Cahyadi dan Ni Luh Supadmi (2019), Muhammad Reza Rahim dan Syamsuri Rahim (2019).

Perkembangan penganggaran pada sektor pemerintahan sudah berkembang maju. Sistem penganggaran sekarang ini bukan berdasarkan *top-down* (dari atas ke bawah) akan tetapi penggabungan dengan sistem *buttom-up* (dari atas ke bawah) sehingga partisipasi dari unit kerja teknis juga diperlukan dalam penyusunan anggaran pada organisasi pemerintahan.

Penggabungan sistem penganggaran *top-down* dan *bottom-up* ini masih dimungkinkan intervensi dari Tim Anggaran Perangkat Daerah sebagai kepanjangan tangan dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses penganggaran di masing-masing unit kerja. Meskipun partisipasi anggaran mempunyai potensi dalam menciptakan senjangan anggaran akan tetapi dalam penelitian ini pengaruh partisipasi anggaran tidak terlalu tinggi, terbukti dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel diatas yang senilai 38,9%. Yang berarti bahwa potensi partisipasi anggaran mempengaruhi senjangan anggaran hanya 38,9%, sementara sisanya (61,1%) dipengaruhi oleh variabel lain.

### **Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan hasil uji-t atas pengujian hubungan variabel asimetri ( $X_2$ ) terhadap senjangan anggaran ( $Y$ ) diperoleh hasil nilai t hitung senilai sebesar 1,300 sementara nilai t tabel senilai 1,674 dan signifikansi senilai 0,199. Yang berarti bahwa variabel asimetri informasi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel senjangan anggaran ( $Y$ ) karena nilai t hitung (1,300) lebih kecil dari t tabel (1,674), dan juga nilai signifikansi (0,199)  $> 0,05$ . Sehingga Hipotesis penelitian kedua (**H2**) ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Aji Kridawan dan Amir Mahmud (2014); Muhammad Nazmudin Nurrasyid (2015); dan Anggita Lupita Sari, dkk (2019). Menurut Aji Kridawan dan Amir Mahmud (2014) bahwa kemungkinan terjadi asimetri informasi di lingkungan pemerintahan sangat kecil, dikarenakan dalam anggaran sektor publik seperti di pemerintahan daerah sudah terdapat peraturan yang tegas dan jelas tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat termasuk aturan yang terkait dengan informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya sesuai dengan kenyataan mengenai kondisi anggaran. Hal ini sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa setiap proses penganggaran yang dilakukan oleh unit kerja selalu di monitoring dan evaluasi Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Hasil dari Mean untuk variabel asimetri informasi sebagaimana dalam tabel menunjukkan angka 3,14 yang berarti Cukup terindikasi terjadi asimetri informasi akan tetapi dengan nilai standar deviasi sebagaimana dalam tabel yang besar apabila dibanding dengan variabel lainnya, yaitu senilai 6,091 yang artinya penyebaran hasil responden terdapat range

yang lebar terhadap mean, hal ini dapat diartikan bahwa respon responden menanggapi pertanyaan kuesioner cukup merata, yang artinya persepsi responden terhadap indikasi terjadinya asimetri informasi di masing-masing unit kerja cukup beragam (heterogen) dan terdapat kecenderungan untuk menjawab netral.

### **Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Hubungan Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji apakah penggunaan teknologi informasi (Z) dalam memoderasi hubungan partisipasi anggaran (X1) dengan senjangan anggaran (Y) didapatkan hasil bahwa uji regresi atas hubungan partisipasi anggaran (X1), senjangan anggaran (Y), dan penggunaan teknologi informasi (Z) dan juga uji regresi atas hubungan partisipasi anggaran (X1), senjangan anggaran (Y), dan interaksi penggunaan teknologi dan senjangan anggaran (X1\*Y) dan interaksi X1 dan Z didapatkan hasil nilai t hitung -1,736. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel pada df 53 senilai 1,674. Nilai negatif pada t hitung menunjukkan arah hubungan yang negatif. Nilai koefisien regresi Beta untuk interaksi variabel partisipasi anggaran (X1) dan penggunaan teknologi informasi (Z) terhadap variabel senjangan anggaran (Y) menunjukkan nilai -0,032, ini berarti penggunaan teknologi informasi memberikan arah negatif/mengurangi/menekan pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Sehingga hipotesis ketiga (**H3**) **diterima**. Akan tetapi hasil nilai signifikansi interaksi adalah senilai 0,089, yang artinya interaksi ini tidak signifikan karena nilai signifikansi > 0,05. Dan dikuatkan dengan nilai regresi beta -0,032 berarti penggunaan teknologi informasi meningkat satu satuan maka interaksi hubungan partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran mengalami penurunan sebesar 0,032.

Menurut Suartana (2010) bahwa senjangan anggaran dan partisipasi anggaran muncul karena aspek berperilaku manusia ketika manusia mencoba hidup dengan anggaran. Hal tersebut mengacu pada kegelisihan (*job insecurity*) karena karyawan merasakan tekanan dari anggaran yang ketat, kegelisihan dari laporan kinerja yang buruk, dan kegembiraan atau puas karena memenuhi anggaran. Hadirnya teknologi informasi diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk menekan hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi kembali kepada perilaku manusia dalam mendesain sistem informasi yang sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya teknologi informasi hanyalah sebagai salah satu alat dalam membantu penggunaannya untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Indah Sulistiyani (2019). Menurut Indah Sulistiyani perubahan teknologi berpengaruh terhadap terjadinya senjangan anggaran. Adanya perubahan teknologi yang sangat pesat akan dapat memberikan suatu senjangan anggaran karena dengan semakin majunya zaman, seorang atasan atau bawahan banyak yang menggunakan suatu teknologi untuk pekerjaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Familia Zahra, dkk (2017) menyatakan bahwa budaya adaptif Teknologi Informasi yang tinggi maka peningkatan kemampuan *e-procurement* akan mengurangi senjangan anggaran.

#### **Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Hubungan Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji apakah penggunaan teknologi informasi (Z) dalam memoderasi hubungan asimetri informasi (X2) dengan senjangan anggaran (Y) didapatkan hasil bahwa uji regresi atas hubungan asimetri informasi (X2), senjangan anggaran (Y), dan penggunaan teknologi informasi (Z) dan juga uji regresi atas hubungan asimetri informasi (X2), senjangan anggaran (Y), dan interaksi penggunaan teknologi dan senjangan anggaran (X2\*Y) dan interaksi X2 dan Z didapatkan hasil nilai t hitung dari hubungan interaksi menunjukkan nilai - 1,417. Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel pada df 53 senilai 1,674. Nilai negatif pada t hitung menunjukkan arah hubungan yang negatif. Nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sehingga interaksi hubungan tidak memiliki pengaruh. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Sehingga hipotesis keempat (**H4**) **ditolak**.

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi Beta untuk interaksi variabel asimetri informasi (X2) dan penggunaan teknologi informasi (Z) terhadap variabel senjangan anggaran (Y) menunjukkan nilai -0,025, ini berarti penggunaan teknologi informasi memberikan arah negatif/mengurangi/menekan pengaruh asimetri informasi terhadap adanya senjangan anggaran. Akan tetapi pengaruhnya sangat kecil, nilai beta -0,025 berarti penggunaan teknologi informasi meningkat satu satuan maka interaksi hubungan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran mengalami penurunan sebesar 0,025. Sementara hasil nilai signifikansi interaksi adalah senilai 0,162, yang artinya interaksi ini tidak signifikan karena nilai signifikansi > 0.05 dan tidak berpengaruh.

Asimetri informasi juga muncul karena aspek berperilaku dalam penganggaran. Adanya ketakutan dan kegelisahan akibat dari tekanan anggaran yang ketat memunculkan

asimetri informasi dalam penganggaran. Asimetri informasi terjadi apabila salah satu pihak memiliki informasi yang lebih. Apabila atasan memiliki informasi yang lebih dibanding bawahan maka anggaran akan dibuat idealis terhadap target yang dipasang, di satu sisi yang menurut pelaksana target tersebut terlalu rendah. Sebaliknya apabila pelaksana/bawahan memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih dibanding atasan maka target anggaran yang terpasang akan terlalu rendah, disinilah senjangan anggaran terjadi. Menurut Suartana (2010:143) senjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetris karena informasi asimetris mendorong bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. Secara teoritis, Asimetri informasi dapat dikurangi dengan memperkuat monitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan melalui desain sistem informasi yang baik. (Suartana, 2010).

## 5.5 Kesimpulan

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran di perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini berdasarkan hasil uji t yang dilakukan untuk menguji hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Hasil nilai t hitung variabel partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran adalah senilai 5,591, sementara nilai t tabel adalah sebesar 1,674. Untuk nilai signifikansi didapatkan nilai 0,001. Sehingga nilai t hitung  $>$  t tabel dan sig  $<$  0,005, dan t hitung bernilai positif, jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Partisipasi anggaran dalam penganggaran pemerintahan adalah sesuatu yang wajib sebagaimana amanah Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran di penganggaran pemerintahan dapat dilakukan dengan membatasi partisipasi anggaran dengan cara peningkatan monitoring dan evaluasi dalam proses penganggaran pemerintah.

- 2) Asimetri informasi tidak mempengaruhi senjangan anggaran di perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. diperoleh hasil nilai t hitung senilai sebesar 1,300 sementara nilai t tabel senilai 1,674 dan signifikansi senilai 0,199. Yang berarti bahwa variabel asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

senjangan anggaran karena nilai  $t$  hitung (1,300) lebih kecil dari  $t$  tabel (1,674), dan juga nilai signifikansi (0,199)  $>$  0,05. Sehingga Hipotesis penelitian kedua (H2) ditolak.

Secara teoritis, Asimetri informasi dapat dikurangi dengan memperkuat monitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan melalui desain sistem informasi yang baik. (Suartana, 2010). Asimetri Informasi tidak dapat mempengaruhi senjangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya hal ini kemungkinan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah lama menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*egovernment*) termasuk dalam penganggaran. Proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring-evaluasi, dan pelaporan semuanya dilakukan dengan penggunaan sistem informasi, sehingga senjangan informasi dan pengetahuan antara atasan dan bawahan dapat dikurangi.

- 3) Penggunaan teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Hasil ini berdasarkan pada pengujian dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) hasil pengujian dari interaksi penggunaan teknologi dan senjangan anggaran ( $X1*Y$ ) dan interaksi  $X1$  dan  $Z$  didapatkan hasil nilai  $t$  hitung -1,736. Nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel pada  $df$  53 senilai 1,674. Nilai negatif pada  $t$  hitung menunjukkan arah hubungan yang negatif. Nilai koefisien regresi Beta untuk interaksi variabel partisipasi anggaran ( $X1$ ) dan penggunaan teknologi informasi ( $Z$ ) terhadap variabel senjangan anggaran ( $Y$ ) menunjukkan nilai -0,032, ini berarti penggunaan teknologi informasi memberikan arah negatif/mengurangi/menekan pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima Akan tetapi hasil nilai signifikansi interaksi adalah senilai 0,089, yang artinya interaksi ini tidak signifikan karena nilai signifikansi  $>$  0,05

Hadirnya teknologi informasi dapat memberikan pengaruh untuk menekan hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Adanya teknologi dan informasi pihak atasan akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap tahapan penyusunan anggaran. Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi kembali kepada perilaku manusia dalam mendesain sistem informasi yang sesuai kebutuhan. Karena pada dasarnya teknologi informasi hanyalah sebagai salah satu alat dalam membantu penggunanya untuk mencapai tujuan.

- 4) Penggunaan teknologi dan informasi tidak mempengaruhi hubungan antara asimetri informasi terhadap senjangan anggaran. Hasil ini didapat dari uji interaksi penggunaan

teknologi dan senjangan anggaran ( $X_2 * Y$ ) dan interaksi  $X_2$  dan  $Z$  didapatkan hasil nilai  $t$  hitung dari hubungan interaksi menunjukkan nilai - 1,417. Nilai  $t$  hitung lebih kecil dari nilai  $t$  tabel pada  $df$  53 senilai 1,674. Nilai negatif pada  $t$  hitung menunjukkan arah hubungan yang negatif. Nilai  $t$  hitung lebih kecil dari nilai  $t$  tabel sehingga interaksi hubungan tidak memiliki pengaruh. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti tidak signifikan. Sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak.

Secara teoritis, Asimetri informasi dapat dikurangi dengan memperkuat monitoring dan meningkatkan kualitas pengungkapan melalui desain sistem informasi yang baik. (Suartana, 2010). Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan bahkan memelopori *egovernment* dalam proses penganggaran, sehingga asimetri informasi dalam proses penganggaran di Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sudah dapat diminimalkan.

### **Batasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang mempengaruhi terciptanya senjangan anggaran. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang menguji seberapa besar pengaruh kedua variabel independen ini menunjukkan nilai 0,389 (38,9%) yang berarti kemampuan kedua variabel independen ini dalam mempengaruhi variabel dependen hanyalah 38,9%, sementara sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi variabel lain. Sehingga masih banyak variabel lain yang mempengaruhi senjangan anggaran.
- 2) Penelitian ini membatasi sampel penelitian hanya pada perangkat daerah yang diduga memahami proses penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bagi organisasi sektor pemerintahan bahwa senjangan anggaran dapat ditekan dengan menekan partisipasi anggaran dengan cara peningkatan monitoring dan evaluasi dengan dukungan desain sistem informasi yang baik.
- 2) Penggunaan teknologi informasi untuk proses penganggaran di Pemerintah Kota Surabaya terbukti mampu menekan asimetri informasi dan partisipasi anggaran,

sehingga Pemerintah Daerah lain lebih dapat untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

- 3) Penelitian atas penggunaan teknologi dan informasi dalam proses penganggaran masih banyak belum dilakukan penelitian mengingat bahwa arah kebijakan sekarang penggunaan teknologi informasi dalam proses penganggaran menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah.
- 4) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen dalam menguji hubungan dengan senjangan anggaran, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lain.
- 5) Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan variabel moderasi untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran mengingat pada beberapa penelitian terakhir dan juga hasil penelitian ini partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap senjangan anggaran.

